

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan rumah tangga pemerintah yang transparan, akun dan bebas dari korupsi serta nepotisme merupakan harapan pemerintah agar tercapai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tentunya hal ini dilakukan agar pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dapat berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Menurut Abubakar, Dibal, Amade, dan Joyce (2017) Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memelihara catatan atas mandat yang diberikan. Lebih lanjut, Abubakar, Dibal, Amade, dan Joyce (2017) menyatakan bahwa konsep akuntabilitas keuangan organisasi publik adalah sejauh mana manajemen organisasi publik tersebut memberikan penjelasan atau pembenaran tentang apa yang telah dikelola atau gagal dilakukan untuk publik atau orang-orang yang berada dalam yuridisnya. Akuntabilitas keuangan dalam hal ini adalah tindakan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara akun. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan atas pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan menuntut manajer organisasi sektor publik untuk memastikan bahwa dana atau sumber daya publik

digunakan secara bijaksana dan didukung oleh metode pencatatan yang memadai dan disajikan dengan cara yang ditentukan yang memungkinkannya tersedia dan dapat diakses oleh publik dan disampaikan pada waktu yang tepat. untuk diteliti oleh publik.

Permasalahan yang sering muncul dalam proses akuntabilitas yaitu belum sesuai pertanggungjawaban pemerintah dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Salah satu penyebabnya karena instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga instrumen pokok akuntabilitas diantaranya *verifiability*, *responsibility*, dan *answerability*. Dengan demikian, instrumen akuntabilitas menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal maupun pertanggungjawaban secara eksternal dan cara-cara yang digunakan agar akuntabilitas dapat tercapai serta kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih menekankan pada akuntabilitas prosedur, peraturan, sistem dan kesesuaian.

Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, maka diperlukan sistem pengendalian terhadap kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian internal digunakan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan agar tujuan dapat tercapai. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akun. Menurut Ahsani (2016), Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pengendalian internal juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan akun. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria seperti yang telah ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yakni keandalan, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Dalam menjalankan akuntabilitas atau pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pemerintah harus memenuhi kriteria-kriteria yakni keandalan, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Menurut amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 23 yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, isi serta format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disajikan dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Iman Bastari (2004) menjelaskan bahwa:

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam mendukung pembaharuan di dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini diperlukan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan, yang akan menjadi payung bagi pemerintah daerah di dalam penyusunan laporan keuangannya secara lebih transparan, akun dan dapat memiliki kualitas daya banding (*comparability*).

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku yang dapat diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dan lengkap dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Dalam setiap kegiatannya, instansi pemerintah dituntut untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan konsep *Value for money* (VFM) karena sektor publik termasuk instansi pemerintah yang sering kali dinilai sebagai sumber pemborosan

dana, sumber penggelapan dana, dan ketidakefisienan sehingga instansi selalu mengalami kerugian. *Value for money* (VFM) adalah kombinasi optimal dari semua biaya dalam siklus aktivitas, risiko, pemenuhan waktu dan kualitas proyek yang bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat, juga sebagai pertimbangan dalam memutuskan untuk melaksanakan proyek dengan metode Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau tidak. Analisis *Value for money* secara luas mencakup nilai uang dari total biaya keseluruhan dalam siklus hidup aset, yang terdiri dari investasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Mardiasmo (2018:191) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dan *Value for money* merupakan jembatan pemerintah agar tercapainya *good governance* dengan tercapainya akuntabilitas pengelolaan akuntabilitas keuangan melalui prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Cirebon mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat salah satunya melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan yang telah dibuat kemudian dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD), Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Barat selama enam kali berturut-turut. Publik mempersepsi bahwa opini WTP mencerminkan penggunaan keuangan yang benar, padahal berulang kali BPK mengingatkan bahwa lembaga yang mendapatkan opini WTP tidaklah dijamin bebas dari korupsi. Terbukti sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah kabupaten Cirebon berdasarkan web.kpk.go.id diantaranya kasus korupsi bantuan sosial oleh Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2015, Korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) di Kecamatan Gegesik tahun 2020, Korupsi Bupati Cirebon terkait jual beli jabatan dan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 tahun 2018 dan Korupsi bantuan alat produksi pertanian oleh pejabat dinas pertanian tahun 2020. Selain itu, dalam segi pembangunan di Kabupaten Cirebon masih perlu mendapat perhatian khusus, diantaranya proyek pembangunan ulang pasar pasalaran plered yang sejak 2017 sampai dengan 2020 belum selesai pengerjaannya karena adanya lemahnya pengawasan atau fungsi kontrol pemerintah dalam proses pembangunan dan kurang maksimalnya perencanaan pembangunan. Menurut Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) proyek pembangunan Pasar Pasalaran Plered gagal karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada tahun 2019 dan diduga terdapat

penyimpangan anggaran proyek pembangunan serta inefisiensi anggaran. Menurut Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Cirebon, Proyek Pembangunan ini telah menghabiskan uang negara sekitar 27 miliar sejak tahun 2017. Hal serupa terjadi pada pasar jambang dan stadion Watubelah Sumber yang pembangunannya belum kunjung selesai. Masalah lainnya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2020, BPK menemukan kelemahan dalam hal sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan yang dapat merugikan pemerintah. Diantaranya dalam hal pengelolaan kas dana bantuan operasional (BOS) yang belum optimal, Volume paket pekerjaan pada DPUPR kurang dari nilai yang telah ditetapkan dalam kontrak, potensi kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan serta pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai sempurna. Lebih rinci disajikan dalam berikut ini:

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

RINGKASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan)	
Pokok-Pokok Kelemahan	Keterangan
Pengelolaan kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum optimal	Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp. 9.157.762.527,00	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II.03 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 Laporan Realisasi Anggaran

Pokok-Pokok Kelemahan	Keterangan
	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II.08 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Akuntansi Aset Tetap
Pengelolaan aset yang disewakan kepada pihak ketiga belum memadai	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sanksi administratif denda kepada wajib pajak belum dikenakan sebesar Rp. 452.422.182,64	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 88
Penaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja belum sesuai peraturan	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah
Volume tiga paket pekerjaan belanja barang pekerjaan pemeliharaan periodik jalan pada DPUPR kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp. 515.342.284,94	Ketidaksesuaian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Volume sembilan paket pekerjaan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp. 119.043.364,98	Ketidaksesuaian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Volume 11 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada DPUPR kurang dari Yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp. 648.045.447,74	Ketidaksesuaian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Volume lima paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Perdagangan dan ditetapkan dalam kontrak senilai Rp. 630.063.127,93	Ketidaksesuaian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaksanaan jaringan pengaman sosial/ <i>social safety net</i> akibat <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) tidak sesuai peraturan	Ketidaksesuaian dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 902/Kep.394-BKAD/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2020 Pada Lampiran Bab II Poin I.B.7
Pertanggungjawaban belanja hibah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) belum sesuai ketentuan	Ketidaksesuaian dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan KONI Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 Nomor 426/850-NPHD/Disbudpora; 034/KONI.KAB.CRB/V/2020 13 April 2020

Pokok-Pokok Kelemahan	Keterangan
Potensi kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran yang wafat, pindah domisili dan data ganda minimal sebesar Rp. 539.635.500,00 dan data peserta tanpa kelengkapan nomor identitas kependudukan sebesar Rp. 1.975.656.000,00	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 Dan Pasal 61 Ayat (1)
Pengelolaan persediaan pada lima OPD belum tertib	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Lampiran I.06 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memadai	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber: jabar-ppid.bpk.go.id

Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang akun perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah seperti yang dikemukakan oleh Iswahyudia, Triyuwono dan Achsin (2017) dalam *Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for money dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang)* bahwa Walaupun akuntabilitas dan *Value for money* diakui turut mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, namun karena kurangnya kemampuan SDM dalam memahami prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga dalam pelaksanaannya akuntabilitas tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam operasional beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sri Mulyani (2018) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, *Value for money*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2018. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Value for money* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Putu Riana, Nyoman Trisna, dan Nyoman Ari (2014) dalam judul Pengaruh Pengendalian Internal, *Value for money*, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dapat diketahui bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung, *Value for money* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung, aksesibilitas laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung dan secara simultan dapat diketahui bahwa pengendalian internal, *Value for money*, penyajian laporan keuangan, dan

aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung.

3. Siti Habibah (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif *good governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Terdapat pengaruh positif standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Terdapat pengaruh positif *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Rizal Ricky Rinaldi (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
5. Andi Ahmad Yani (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Konsep *Value for money*, dan

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Digital (Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sulawesi Selatan) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era Digital, Konsep *Value for money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital, serta Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital.

6. Anita Daun Lamba (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan *Value for money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Palopo (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo, *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo.
7. Muhammad Ichlas, Hasan Basri dan Muhammad Arfan (2014) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

8. Rita Friyani (2017) dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Corporate Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, *good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
9. Pipit Ayuning Pramesti (2020) dengan judul Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Corporate Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

keuangan, audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

10. Muslim A. Djalil, Nadirsyah dan Lisa Fatmi (2017) dengan judul *Influence of Implementation of Government Accounting Standard and the Effectiveness of Government's Internal Control System on the Quality of Local Financial Report and Its Impact Toward the Accountability of Regional Financial Management (A Research on Government Agencies of Aceh Province, Indonesia)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik langsung maupun tidak langsung, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
11. Nur Azizah, Junaidi, dan Achdiar Redy Setiawan (2015) dengan judul *Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan penyajian laporan keuangan; namun aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

12. Rina Maulina, Lisa Fatmi (2018) dengan judul Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Implikasinya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki berpengaruh pada akuntabilitas manajemen keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah memiliki efek langsung atau tidak langsung pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
13. Anesa Pramudita (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Value for money*, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Value for money* tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

14. Meida Yusinta (2018) dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern, *Value for money*, dan penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD KABUPATEN Agam). Penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif antara Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam, Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara *Value for money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam. Terdapat pengaruh secara positif antara antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam. Terdapat pengaruh secara simultan Pengendalian Intern, *Value for money*, Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam.
15. Eka Ari Shintia (2017) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal dan *Value for money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal dan *Value for money* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

16. Esa Putera Perdana (2019) dengan judul Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja *Value for money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Kinerja *Value for money* berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Roswati Nartin Jimut (2020) dengan judul Pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten manggarai, Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan
18. Mawaddah, Murhaban dan Dewi Kemala Sari (2019) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan

keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

19. Riki Rizkiawan (2019) dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Aksesibilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.
20. Jehan Rafliya Junor (2020) dengan judul Pengaruh penerapan *Value for money*, pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Value for money* ekonomis dan efisiensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu disajikan dalam persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Sri Mulyani, 2018	- Variabel Independen: <i>Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	- Variabel Independen: Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. <i>Value for money</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	eprints.unisbank.ac.id (Repository Universitas Stikubank)
2.	Putu Riana Primayani, Nyoman Trisna Herawati dan Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014	- Variabel Independen: Pengendalian Internal, <i>Value for money</i> , Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan - Metode Penelitian:	- Variabel Independen: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan	Secara parsial dapat diketahui bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung, <i>Value for money</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di	e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume: 2 No. 1 (2014)

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda		SKPD Kabupaten Klungkung, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung, Aksesibilitas laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung dan secara simultan dapat diketahui bahwa pengendalian internal, <i>Value for money</i> , penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung.	
3.	Siti Habibah, 2020	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	- Variabel Independen: <i>Good Governance, Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal	Terdapat pengaruh positif <i>good governance</i> terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Terdapat pengaruh positif standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Terdapat pengaruh positif <i>good</i>	Repository.uni gal.ac.id (Unigal Repository)

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.	
4.	Rizal Ricky Rinaldi, 2016	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	- Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> , Audit Kinerja, <i>Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal	<i>Good Governance</i> , Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.	Eprints.ums.ac.id (Institutional Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta)
5.	Andi Ahmad Yani, 2020	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	Penelitian ini dihubungkan dengan digitalisasi teknologi	Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital, Konsep <i>Value for money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital, serta sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital.	digilibadmin.unismuh.ac.id (Digital Repository Universitas Muhammadiyah Makassar)

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
6.	Anita Daun Lamba, 2020	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Value for money</i> , Variabel Dependen: Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	- Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo, <i>Value for money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo.	repository.umpalopo.ac.id (Repository Universitas Muhammadiyah Palopo)
7.	Muhammad Ichlas, Hasan Basri dan Muhammad Arfan, 2014	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	- Variabel Independen: <i>Value for money</i> , Aksesibilitas Laporan Keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, No. 4, November (2014) ISSN 2302-0164
8.	Rita Friyani, 2017	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan	- Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, <i>Good Corporate governance</i> , <i>Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal		Online-journal.unja.ac.id Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol.1 No.2

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		- Metode Penelitian: Kuantitatif		Desentralisasi Fiskal, Good Governance dan Standar Akuntansi	
		- Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda		Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, good Governance tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.	
9.	Pipit Ayuning Pramesti, 2020	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan	- Variabel Independen: Komitmen Kepala Daerah, <i>Good Corporate Governance</i> , Audit Kinerja, <i>Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, good governance tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, SAP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan	Repository.ups tegal.ac.id Repository universitas pancasakti tegal

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
10.	Muslim A. Djalil, Nadirsyah dan Lisa Fatmi, 2017	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem pengendalian internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan - Metode Penelitian: Kuantitatif	- Variabel Independen: Kualitas Laporan Keuangan, <i>Value for money</i> - Alat Analisis: Analisis Path	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik langsung maupun tidak langsung, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Research Journal of Finance and Accounting, Vol.8, No.4, (2017) ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online)
11.	Nur Azizah, Junaidi, dan Achdiar Redy Setiawan (2015)	- Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Variabel Independen: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Transparansi, <i>Value for money</i> , standar akuntansi	Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan penyajian laporan keuangan; namun aksesibilitas laporan	Journal of Research and Applications: Accounting and Management 1(2), p. 111, ISSN 2443-1419, Politeknik Negeri Malang

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		- Metode Penelitian: Kuantitatif	Keuangan	keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	
12.	Rina Maulina, Lisa Fatmi (2018)	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Variabel Independen: <i>Value for money</i> Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Penelitian ini menunjukkan Implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh pada akuntabilitas manajemen keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah memiliki efek langsung atau tidak langsung pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Jurnal.utu.ac.id Jurnal AKBIS Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018
13.	Anesa Pramudita (2017)	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Value for money</i> , Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Hasil penelitian menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, <i>Value for money</i> tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian	eprints.umpo.a c.id Repository universitas muhammadiyah h ponorogo

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		- Metode Penelitian: Kuantitatif		internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	
		- Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda			
14.	Meida Yusinta (2018)	- Variabel Independen: Pengendalian Internal, <i>Value for money</i> Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyajian Laporan Keuangan	Terdapat pengaruh positif antara Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam. Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara <i>Value for money</i> terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam. Terdapat pengaruh secara positif antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Agam.	repository.uir.ac.id Repository universitas islam riau
		- Metode Penelitian: Kuantitatif			
		- Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda			
15.	Eka Ari Shintia (2017)	- Variabel Independen: Pengendalian Internal, <i>Value for money</i> Variabel	- Variabel Independen: Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah,	eprints.umk.ac.id UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		<p>Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>- Metode Penelitian: Kuantitatif</p> <p>- Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Pemerintahan, Aksesibilitas Laporan Keuangan</p>	<p>pengendalian internal dan <i>Value for money</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>	
16.	Esa Putera Perdana (2019)	<p>- Variabel Independen: <i>Value for money</i>, Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>- Metode Penelitian: Kuantitatif</p> <p>- Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	<p>- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Kinerja <i>Value for money</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>repository.unp as.ac.id Institutional repositories&s cientific journals</p>
17.	Roswati Nartin Jimut, 2020	<p>- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan</p> <p>- Metode Penelitian: Kuantitatif</p> <p>- Alat Analisis: Analisis</p>	<p>- Variabel Independen: <i>Value for money, Good Governance</i>, Ko mitmen Organisasi</p>	<p>good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten manggarai, Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan</p>	

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Regresi Berganda		terhadap Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan	
18.	Mawaddah, murhaban dan Dewi Kemala Sari (2019)	- Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Value for money</i> , Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Jurnal akuntansi dan pembangunan STIE Lhokseumawe volume 5 nomor 2 Juni 2019
19.	Riki Rizkiawan (2019)	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas	- Variabel Independen: <i>Value for money</i> , Aksesibilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif	Repository.uni ssula.ac.id Unissula Institutional Repository

No.	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Keuangan		dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Aksesibilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	
20.	Jehan Rafliya Junor (2020)	- Variabel Independen: <i>Value for money</i> , Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Metode Penelitian: Kuantitatif - Alat Analisis: Analisis Regresi Berganda	- Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Aksesibilitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan <i>Value for money</i> ekonomis dan efisiensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Eprints.upnyk.ac.id Repository UPN Yogyakarta
<p>Indah Fajriyah (2022) 183403054 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Value for money</i>, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap AKuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Cirebon Tahun 2020)</p>					
<p>Sumber: Jurnal</p>					

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Value for money* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Cirebon Tahun 2020).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan, *Value for money*, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
2. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, *Value for money* dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan, *Value for money*, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, *Value for money* dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta menambah pengetahuan yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Bagi SKPD di Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan terutama kebijakan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi pihak yang mendalami topik yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan hal ini penulis akan melaksanakan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Cirebon yang beralamat di Komplek pemerintahan Kabupaten Cirebon
Jalan Sunan Muria Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini direncanakan dari bulan November 2021 sampai dengan Maret 2022. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan dalam lampiran 1 jadwal penelitian